

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam Menyusun, mengendalikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja Perubahan ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Oktober 2022

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2022	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.....	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	21
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	30
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	33
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	46
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	46
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	65
BAB V PENUTUP	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan dokumen resmi yang disusun Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, terlebih Renja Perubahan Tahun 2022 merupakan periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Renja Perubahan memiliki peranan penting sebagai berikut:

1. Renja Perubahan perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansi merupakan penjabaran visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2022.

3. Renja Perubahan perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan.

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

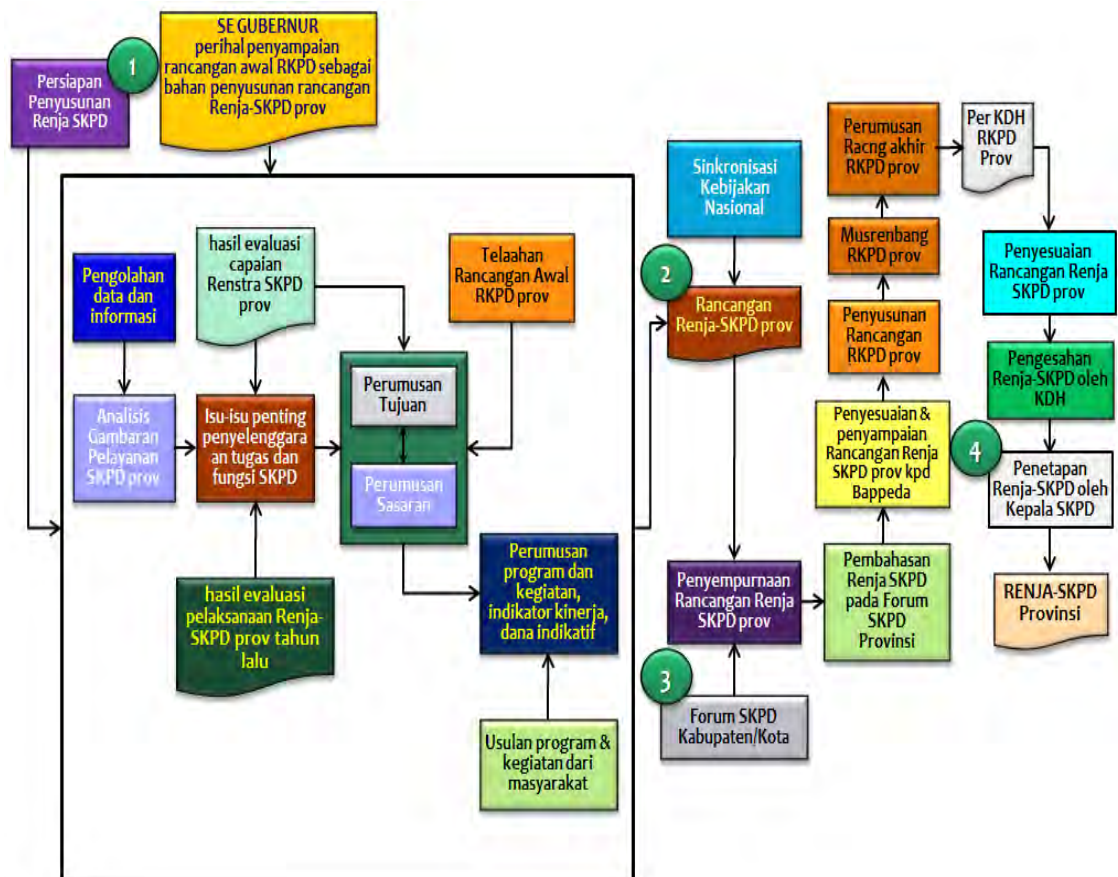
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat.

Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Banten Tahun 2021 dimana setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra-OPD. Adapun keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional



Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2022 tentang Renstra 2023-2026;
18. Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 adalah:

- 1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
- 2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2022 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.

- 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- 4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten;
- 5) Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab awal ini akan mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja Perubahan beserta pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan berisikan penutup Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi bagian pembinaan dan pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan entitas seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat terlihat adanya perbedaan sasaran serta program kegiatan di tahun 2019-2020 dengan program kegiatan di tahun 2021-2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Provinsi Banten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN										
3	0	2	0	1	Program Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya pelayanan perkantoran	100%	100%		
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%					
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%					
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%					
		Peningkatan Pengelolaan kearsipan dan pelayanan Perpustakaan		100%	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	100%						
6 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1						2	3	4	5	6	7	8=(7 /6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			100%	100%	100%			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	0	2	1	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
						Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Capaian pengawasan internal bidang pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Capaian Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	Persentase Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persentase capaian Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur	Capaian Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan									
60102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Maturitas SPIP						100%	75%	75%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan						100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah						100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah						100%	151%	151%
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten						100%	98%	98%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI						100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						100%	177%	177%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah						100%	200%	200%
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP						100%	100%	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						100%	100%	100%

Terkait dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 pada umumnya realisasi program kegiatan telah tercapai sesuai dengan target penyerapan anggaran maupun target kinerja yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat program kegiatan yang capaiannya tidak 100%.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 dan prakiraan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi kinerja Tahun 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	77.92	85	77.92	92%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Maturitas SPIP	Nilai 4	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 3	75%
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100%	151%	100%	151%	151%
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	98%	100%	98%	98%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	177%	100%	177%	177%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	200%	100%	200%	200%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pendampingan dan Asistensi						

Program prioritas yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfokus pada urusan pengawasan dengan prioritas program pengawasan dibidang internal yang berfokus kepada pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik itu yang berasal dari Inspektorat maupun dari BPK RI, disamping itu Inspektorat daerah Provinsi Banten juga memiliki program yang berfokus kepada pendampingan OPD, peningkatan kapabilitas APIP serta perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan yang terangkum dalam program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Tabel. 2.3 Program Prioritas Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Inspektorat Daerah provinsi Banten tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan hasil realisasinya pada tahun 2021.

Adapun target capaian kinerja sasaran tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator
sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Nilai	85	77,92	92%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Level	4	3	75%
		Capaian level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan masih terdapat target kinerja sasaran dengan realisasinya dibawah 100%, terutama pada indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP. Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Banten

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	75	80	85	90	75	87.67	77.92	80	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai Maturitas SPIP	3	3	4	4	3	3	3	3	penilaian dilakukan oleh BPKP
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	3	3	3	3	Penilaian dilakukan oleh BPKP
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pendampingan dan Asistensi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2021.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran ke- 1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Nilai 85
Realisasi	:	Nilai 77,92
Capaian	:	92%

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menunjukan persentase dibawah 100% lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat efesiensi dalam penyerapan anggaran dikarenakan terkendala dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga pada beberapa pos rekening anggaran tidak dapat dilaksanakan;
- Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kondisi pandemi covid 19, mengakibatkan terdapat beberapa jadwal yang telah ditargetkan tidak tercapai dengan baik sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya.

Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah

Sasaran ke- 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

IKU pertama yaitu **Capaian Maturitas SPIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Level 4
Realisasi	:	Level 3
Capaian	:	75%

Jika dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukan hasil yang tidak selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang

tinggi tidak berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

- a. Perubahan target indikator kinerja capaian sasaran pada saat penetapan RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu capaian maturitas SPIP, dari semula level 3 menjadi level 4;
- b. Data capaian kinerja atas indikator tersebut bersumber dari data eksternal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2019 melalui hasil *Quality Assurance (QA)* atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja untuk Tahun 2021 belum dilaksanakan penilaian ulang.
- c. Terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak mendukung pada pencapaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang mengakibatkan beberapa aktivitas yang dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap penilaian pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

IKU Kedua yaitu **Level Kapabilitas APIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	: Level 3
Realisasi	: Level 3
Capaian	: 100%

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
- b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Banten;

- c. Kompetensi dan integritas para ASN yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- d. Adanya *reward and punishment* bagi ASN, sehingga dapat menimbulkan semangat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;

Alokasi Anggaran

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp.70.364.066.518,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.55.336.902.768,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.15.027.163.750,00. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 78.64% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 21.36% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal dengan persentase 37.77% dari total anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.6
Anggaran Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		55.336.902.768,00
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	54.957.582.768,00
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan	335.850.000,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Bulan	43.470.000,00
B	BELANJA LANGSUNG		15.027.163.750,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.885.793.500,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81.585.000,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52.085.000,00

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	T A R G E T K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	6.100.000,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.400.000,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		674.500.000,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	52.000.000,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	622.500.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.676.859.400,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	98.000.000,00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	431.068.400,00
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Kegiatan	285.195.000,00
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	232.924.000,00
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	629.672.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		537.989.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Kegiatan	37.989.000,00
	1 Lainnya		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	3 Kegiatan	500.000.000,00
	2 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.463.466.000,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	641.462.400,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.822.003.600,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.451.394.100,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	6 Unit	187.410.000,00
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	384.838.000,00
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	131.770.000,00

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	747.376.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.549.159.250,00
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		5.676.153.250,00
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	305.300.000,00
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	4.092.381.250,00
	3. Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan	280.650.000,00
	4. Reviu Laporan Keuangan	12 Kegiatan	570.123.000,00
	5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Kegiatan	427.699.000,00
8	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		873.006.000,00
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	138.320.000,00
	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kegiatan	734.686.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.592.211.000,00
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		512.590.000,00
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan	512.590.000,00
10	Pendampingan dan Asistensi		1.079.621.000,00
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Kegiatan	662.595.000,00
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	45.050.000,00
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	358.276.000,00
	4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	13.700.000,00
JUMLAH			70.364.066.518,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai *Quality Assurance* mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengawal kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
- b. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
- c. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
- d. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
- e. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

- f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
- g. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
- h. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
- i. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
- j. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tabel 2.7
Permasalahan, faktor pendorong dan penghambat Inspektorat

Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut	1 <i>Internal Audit Charter</i> (IAC)	1 Kompetensi serta jumlah SDM APIP dan sarana prasarana yang menunjang pemeriksaan belum memadai
Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara	2 <i>Political Will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik di nasional maupun daerah	2 Komitmen OPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan manajemen risiko masih rendah
Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada OPD	3 Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis	3 Komitmen OPD tentang pemenuhan PMPRB dalam organisasinya masih rendah
Keseriusan OPD masih kurang dalam meningkatkan nilai SAKIP		4 Komitmen APIP dalam peningkatan kapabilitas APIP belum optimal
Belum terimplementasikan nya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik	4 Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk hukum daerah	5 Komitmen unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas masih sangat rendah
		6 Kurangnya metode pembinaan pengawasan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan serta rancangan awal RKPD Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022								Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan									
	Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Capaian Program		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)					
			Program		Keluaran Sub Kegiatan							Program		Keluaran Sub Kegiatan							
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH									59,927,967,000	74,534,948,000	INSPEKTORAT DAERAH									59,927,967,000	74,534,948,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									51,052,090,000	67,433,892,750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									51,052,090,000	67,433,892,750
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									259,627,000	307,627,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									259,627,000	307,627,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	6 Dok	6 Dok	180,845,000	180,845,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	6 Dok	6 Dok	180,845,000	180,845,000				

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	4 Dok	4 Dok	27,600,000	27,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	4 Dok	4 Dok	27,600,000	27,600,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	4 Dok	4 Dok	51,182,000	99,182,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	4 Dok	4 Dok	51,182,000	99,182,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							43,685,820,000	60,193,630,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							43,685,820,000	60,193,630,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	14 Dok	14 Dok	43,297,800,000	59,803,840,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	14 Dok	14 Dok	43,297,800,000	59,803,840,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	338,550,000	364,890,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	338,550,000	364,890,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	49,470,000	24,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	49,470,000	24,900,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							450,000,000	650,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							450,000,000	650,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	0 kegiatan	0 kegiatan	0	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	0 kegiatan	0 kegiatan	0	200,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	450,000,000	450,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	450,000,000	450,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,307,195,600	1,318,952,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,307,195,600	1,318,952,100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 Dok	1 Dok	107,800,000	107,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 Dok	1 Dok	107,800,000	107,800,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	348,781,600	551,948,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	348,781,600	551,948,100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	313,714,000	202,920,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	313,714,000	202,920,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	350,000,000	425,609,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Dok	12 Dok	350,000,000	425,609,000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	186,900,000	30,675,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	2 Dok	2 Dok	186,900,000	30,675,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							166,516,000	946,574,750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							166,516,000	946,574,750
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 Dok	1 Dok	166,516,000	946,574,750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 Dok	1 Dok	166,516,000	946,574,750
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,648,216,400	2,555,843,900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,648,216,400	2,555,843,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	641,462,400	641,462,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	641,462,400	641,462,400

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	2,006,754,000	1,914,381,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	2,006,754,000	1,914,381,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,534,715,000	1,461,265,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,534,715,000	1,461,265,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 unit	1 unit	75,910,000	75,910,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 unit	1 unit	75,910,000	75,910,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	28 unit	28 unit	555,020,000	604,020,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	28 unit	28 unit	555,020,000	604,020,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	58 Unit 4 Unit 119 Unit	58 Unit 4 Unit 119 Unit	131,770,000	131,770,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	58 Unit 4 Unit 119 Unit	58 Unit 4 Unit 119 Unit	131,770,000	131,770,000



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 gedung	1 gedung	1,772,015,000	649,565,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	1 gedung	1 gedung	1,772,015,000	649,565,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							7,381,913,000	5,654,268,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							7,381,913,000	5,654,268,500
Penyelenggaraan Pengawasan Internal							6,518,218,000	4,716,523,500	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							6,518,218,000	4,716,523,500
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Dok	15 Dok	638,846,000	709,576,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Dok	15 Dok	638,846,000	709,576,000

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	192 Dok	192 Dok	4,995,952,000	3,146,192,500	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	192 Dok	192 Dok	4,995,952,000	3,146,192,500
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan									Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan							

Reviu Laporan Kinerja	Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	46 Dok	46 Dok	182,350,000	182,350,000	Reviu Laporan Kinerja	Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	46 Dok	46 Dok	182,350,000	182,350,000
Reviu Laporan Keuangan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	85 Dok	85 Dok	217,340,000	312,900,000	Reviu Laporan Keuangan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	85 Dok	85 Dok	217,340,000	312,900,000

	dan BPK RI									dan BPK RI							
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %100 %100 %100 %	100 %100 %100 %100 %	8 Dok	8 Dok	483,730,000	365,505,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %100 %100 %100 %	100 %100 %100 %100 %	8 Dok	8 Dok	483,730,000	365,505,000
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							863,695,000	937,745,000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							863,695,000	937,745,000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 2 Sub Kegiatan	100 % 2 Sub Kegiatan	4 Dok	4 Dok	144,420,000	137,770,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 2 Sub Kegiatan	100 % 2 Sub Kegiatan	4 Dok	4 Dok	144,420,000	137,770,000

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 2 Sub Kegiatan	100 % 2 Sub Kegiatan	10 Dok	10 Dok	719,275,000	799,975,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 2 Sub Kegiatan	100 % 2 Sub Kegiatan	10 Dok	10 Dok	719,275,000	799,975,000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							1,493,964,000	1,446,786,750	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							1,493,964,000	1,446,786,750
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							161,177,250	122,875,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							161,177,250	122,875,000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	8 Dok	8 Dok	161,177,250	122,875,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %	100 %	8 Dok	8 Dok	161,177,250	122,875,000
Pendampingan dan Asistensi							1,332,786,750	1,323,911,750	Pendampingan dan Asistensi							1,332,786,750	1,323,911,750
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	29 Dok	29 Dok	595,275,000	403,200,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	29 Dok	29 Dok	595,275,000	403,200,000

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %100 %	100 %100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	138,240,000	158,240,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 %100 %	100 %100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	138,240,000	158,240,000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Dok	6 Dok	480,731,750	643,931,750	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Dok	6 Dok	480,731,750	643,931,750
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dok	1 Dok	118,540,000	118,540,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dok	1 Dok	118,540,000	118,540,000
							59,927,967,000	74,534,948,000								59,927,967,000	74,534,948,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten bersama dengan para pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum musrenbang tersebut untuk Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat, antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten 2017-2022. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Banten Perubahan Tahun 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Banten tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan target Inspektorat Daerah Provinsi Banten
tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				2022
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Maturitas SPIP	Nilai	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	4

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) program antara lain:

- Program Tata Kelola Pemerintahan;
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk Kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran.

Secara keseluruhan terdapat 11 (sepuluh) rencana kegiatan untuk anggaran perubahan tahun 2022 pada Inspektorat Provinsi Banten antara lain:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Program dan kegiatan pada tahun 2022 anggaran perubahan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022				
	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		Selisih
	Keluaran Sub Kegiatan				
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH			59,927,967,000	74,534,948,000	14,606,981,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51,052,090,000	67,433,892,750	16,381,802,750
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			259,627,000	307,627,000	48,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	180,845,000	180,845,000	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	27,600,000	27,600,000	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	51,182,000	99,182,000	48,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43,685,820,000	60,193,630,000	16,507,810,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dok	14 Dok	43,297,800,000	59,803,840,000	16,506,040,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	338,550,000	364,890,000	26,340,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Dok	12 Dok	49,470,000	24,900,000	-24,570,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			450,000,000	650,000,000	200,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 kegiatan	0 kegiatan	0	200,000,000	200,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	60 Orang	450,000,000	450,000,000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,307,195,600	1,318,952,100	11,756,500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dok	1 Dok	107,800,000	107,800,000	0



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Dok	2 Dok	348,781,600	551,948,100	203,166,500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Dok	2 Dok	313,714,000	202,920,000	-110,794,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	12 Dok	350,000,000	425,609,000	75,609,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	186,900,000	30,675,000	-156,225,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			166,516,000	946,574,750	780,058,750
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dok	1 Dok	166,516,000	946,574,750	780,058,750
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,648,216,400	2,555,843,900	-92,372,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	641,462,400	641,462,400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	2,006,754,000	1,914,381,500	-92,372,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,534,715,000	1,461,265,000	-1,073,450,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	75,910,000	75,910,000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 unit	28 unit	555,020,000	604,020,000	49,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit 4 Unit 119 Unit	58 Unit 4 Unit 119 Unit	131,770,000	131,770,000	0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	1,772,015,000	649,565,000	-1,122,450,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			7,381,913,000	5,654,268,500	-1,727,644,500
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6,518,218,000	4,716,523,500	-1,801,694,500
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Dok	15 Dok	638,846,000	709,576,000	70,730,000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	192 Dok	192 Dok	4,995,952,000	3,146,192,500	-1,849,759,500
Reviu Laporan Kinerja	46 Dok	46 Dok	182,350,000	182,350,000	0
Reviu Laporan Keuangan	85 Dok	85 Dok	217,340,000	312,900,000	95,560,000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dok	8 Dok	483,730,000	365,505,000	-118,225,000
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			863,695,000	937,745,000	74,050,000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Dok	4 Dok	144,420,000	137,770,000	-6,650,000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Dok	10 Dok	719,275,000	799,975,000	80,700,000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,493,964,000	1,446,786,750	-47,177,250
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			161,177,250	122,875,000	-38,302,250
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8 Dok	8 Dok	161,177,250	122,875,000	-38,302,250
Pendampingan dan Asistensi			1,332,786,750	1,323,911,750	-8,875,000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 Dok	29 Dok	595,275,000	403,200,000	-192,075,000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	138,240,000	158,240,000	20,000,000



Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Dok	6 Dok	480,731,750	643,931,750	163,200,000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Dok	1 Dok	118,540,000	118,540,000	0
			59,927,967,000	74,534,948,000	14,606,981,000

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Banten

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Keluaran Sub Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				59,927,967,000	74,534,948,000				69,358,028,000			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				51,052,090,000	67,433,892,750				58,862,048,000			
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				259,627,000	307,627,000				320,000,000			
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	6 Dokumen	6 Dokumen	180,845,000	180,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %	200,000,000	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Dokumen	4 Dokumen	27,600,000	27,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan	100 %	30,000,000	

						pelaporan perangkat daerah								pelaporan perangkat daerah		
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Dokumen	4 Dokumen	51,182,000	99,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %	90,000,000
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43,685,820,000	60,193,630,000				52,077,150,000	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	14 Dokumen	14 Dokumen	43,297,800,000	59,803,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	51,748,000,000
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan funesi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	12 Dokumen	338,550,000	364,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan funesi SKPD	100 %	269,150,000

6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	12 Dokumen	49,470,000	24,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	60,000,000
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					450,000,000	650,000,000				940,500,000
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	0 kegiatan	0 kegiatan	0	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	198,000,000
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	60 Orang	60 Orang	450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	742,500,000
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,307,195,600	1,318,952,100				1,304,098,000
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	1 Dokumen	107,800,000	107,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	100 %	107,800,000

6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	perangkat daerah Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	2 Dokumen	2 Dokumen	348,781,600	551,948,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	345,684,000
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	2 Dokumen	2 Dokumen	313,714,000	202,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	313,714,000
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	12 Dokumen	350,000,000	425,609,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	350,000,000
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	2 Dokumen	2 Dokumen	186,900,000	30,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	186,900,000

6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					166,516,000	946,574,750					517,755,000
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	1 Dokumen	166,516,000	946,574,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	517,755,000
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	0
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,648,216,400	2,555,843,900					2,817,830,000
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Bulan	12 Bulan	641,462,400	641,462,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	641,462,400

6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 bulan	12 bulan	2,006,754,000	1,914,381,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	2,176,367,600
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,534,715,000		1,461,265,000		884,715,000			
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 unit	1 unit	75,910,000	75,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	75,910,000
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	28 unit	28 unit	555,020,000	604,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	555,020,000
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	58 Unit 4 Unit 119 Unit	58 Unit 4 Unit 119 Unit	131,770,000	131,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100 %	131,770,000

6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 gedung	1 gedung	1,772,015,000	649,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	122,015,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7,381,913,000	5,654,268,500				9,249,814,750
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					6,518,218,000	4,716,523,500				7,713,791,750
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	15 Dokumen	15 Dokumen	638,846,000	709,576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100 % 100 % 100 % 100 %	612,598,000

6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	192 Dokumen	192 Dokumen	4,995,952,000	3,146,192,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100 % 100 % 100 % 100 %	5,724,360,000
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	46 Dokumen	46 Dokumen	182,350,000	182,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100 % 100 % 100 % 100 %	291,440,000

						Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI								APIP dan BPK RI		
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	85 Dokumen	85 Dokumen	217,340,000	312,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100 % 100 % 100 % 100 %	211,150,000	

6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Kota Serang, Curug, Sukajaya	8 Dokumen	8 Dokumen	483,730,000	365,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100 % 100 % 100 % 100 %	874,243,750
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					863,695,000	937,745,000				1,536,023,000
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Dokumen	4 Dokumen	144,420,000	137,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 % 2 Sub Kegiatan	152,152,000

6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Serang, Curug, Sukajaya	10 Dokumen	10 Dokumen	719,275,000	799,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 % 2 Sub Kegiatan	1,383,871,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1,493,964,000	1,446,786,750				1,246,165,250
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					161,177,250	122,875,000				161,177,250
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	8 Dokumen	8 Dokumen	161,177,250	122,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100 %	161,177,250
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi					1,332,786,750	1,323,911,750				1,084,988,000
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	29 Dokumen	29 Dokumen	595,275,000	403,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100 % 100 %	769,246,000

6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	1 Dokumen	138,240,000	158,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 % 100 %	38,145,000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	6 Dokumen	6 Dokumen	480,731,750	643,931,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 % 100 %	255,452,000
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	1 Dokumen	118,540,000	118,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 % 100 %	22,145,000
TOTAL										59,927,967,000	74,534,948,000			69,358,028,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Perubahan pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Banten berpedomanan pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2022, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Itermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD	
				Target	Pagu Indikatif		
INSPEKTORAT DAERAH					68,528,028,000	Inspektorat	
Tujuan PD : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Sasaran PD : Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP 77,92	Nilai SAKIP 90	58,732,048,000	Inspektorat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			307,627,000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	180,845,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dokumen	27,600,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	99,182,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			60,193,630,000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Dokumen	59,803,840,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	364,890,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		12 Dokumen	24,900,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			650,000,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 kegiatan	200,000,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		60 orang	450,000,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,318,952,100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Dokumen	107,800,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2 Dokumen	551,948,100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2 Dokumen	202,920,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Dokumen	425,609,000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dokumen	30,675,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			946,574,750	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Dokumen	946,574,750	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 Kegiatan	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,555,843,900	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	641,462,400	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	1,914,381,500	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,461,265,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	75,910,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		28 unit	604,020,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		181 unit	131,770,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	649,565,000	
Tujuan PD : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Sasaran PD : Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 4	5,654,268,500	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			4,716,523,500	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		2 laporan	709,576,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		2 laporan	3,146,192,500	
		Reviu Laporan Kinerja		2 laporan	182,350,000	
		Reviu Laporan Keuangan		2 laporan	312,900,000	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 laporan	365,505,000	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			937,745,000	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		2 laporan	137,770,000	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		2 laporan	799,975,000	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas APIP level 3	Kapabilitas APIP level 4	1,446,786,750	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			122,875,000	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		2 laporan	122,875,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatandan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Pendampingan dan Asistensi			1,323,911,750	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		2 laporan	403,200,000	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		2 laporan	158,240,000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 laporan	643,931,750	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		2 laporan	118,540,000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Program antara lain :

- a. Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan Pemdampingan dan Asistensi

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 11 (Sebelas) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.

- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Oktober 2022

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001